

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah berarti peningkatan pendapatan masyarakat yang dihasilkan secara keseluruhan di daerah tersebut. Pendapatan daerah adalah remunerasi untuk faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, teknologi) yang beroperasi di daerah tersebut. Artinya, secara kasar bisa menggambarkan kemakmuran daerah.

tingkatan pendapatan per kapita diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi negara berkembang seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dan didukung melalui proses atau aktivitas pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya memberikan kekuatan (pemberdayaan) atau enhancement (pembinaan) kepada masyarakat. Pemberdayaan komunitas juga diartikan sebagai kemampuan individu dan komunitas untuk membangun pemberdayaan komunitas yang terlibat, dengan tujuan menemukan opsi-opsi baru dalam pengembangan komunitas..¹.

¹ Nugroho, Rianto. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Jika Bank Dunia merilis data, yaitu angka pertumbuhan tahunan Indonesia 1,2%, jumlah penduduk akan mencapai 265 juta pada 2018. Penduduk Indonesia saat ini melebihi 53,3% di perkotaan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018) dan sisanya tersebar di perdesaan, namun teknologi memungkinkan adanya upaya untuk mengurangi tingkat infrastruktur dan kepadatan perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada 2018 mencapai 25,95 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin menurun 633,2 ribu dibandingkan tahun 2017 menjadi 26,58 juta atau 10,12% dari total penduduk yang terjadi di perdesaan. Kondisi ini penting dalam menentukan pelaksanaan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya menurunkan tingkat persentase penduduk miskin.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi biasanya dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah sekumpulan kegiatan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Rangkaian kegiatan ini mencakup penyiapan perangkat regulasi lebih lanjut yang membentuk interpretasi kebijakan. Misalnya, undang-undang mengungkapkan banyak peraturan pemerintah, perintah eksekutif, dan peraturan daerah yang mendorong pelaksanaan, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan, tentu saja, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut disampaikan. Kami sedang mempersiapkan sumber daya untuk

melakukannya. Langsung ke komunitas. Sebagai aturan umum, menerapkan kebijakan kurang lebih adalah cara kebijakan mencapai tujuannya.

Ada dua opsi untuk menerapkan kebijakan publik. Artinya, langsung dalam bentuk program, atau dengan membuat kebijakan turunan atau turunan dari suatu kebijakan. Kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik yang deskriptif atau sering disebut dengan istilah regulasi penegakan. Kebijakan publik yang dapat diterapkan secara langsung antara lain Keputusan Presiden, Perintah Eksekutif, Keputusan Menteri, Kepala Daerah, dan Kepala Layanan Keputusan²

Definisi implementasi di atas tidak hanya sebuah kebijakan yang dirumuskan dan dibuat dengan cara yang positif, seperti undang-undang, jika terkait dengan kebijakan, tetapi juga secara implisit diterapkan, serta dampak dari tujuannya. Atau tujuan juga diterapkan. Dengan kata lain, Anda perlu menerapkan atau menerapkan kebijakan untuk mencapai itu. Penerapan kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode tertentu. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan diperlukan proses implementasi yang dilakukan dengan menentukan langkah-langkah yang tepat agar proses implementasi dapat mengikuti aturan..

Proses implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai setelah tujuan kebijakan publik ditetapkan, program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan

² Nugroho, Riant, 2004. Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia Hlm : 158 - 160

untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Penegakan kebijakan, dalam arti yang paling luas, adalah sekumpulan aktor, organisasi, prosedur kerja, dan teknik yang berbeda yang bekerja sama untuk menerapkan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat³

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu keluar dari kemiskinan dan mengembangkan jebakan. Singkatnya, pemberdayaan memungkinkan dan tidak bergantung pada komunitas. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan / meningkatkan kemampuan suatu masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan⁴. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan yang lebih besar dari aparat pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai⁵.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, sehingga dukungan dapat diberikan melalui proses penyampaian pemberdayaan atau sistem yang diterapkan. Bentuk aktualnya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai upaya memaksimalkan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Pada tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan undang-undang nomor tersebut, kewenangan

³ Winarno, Budi, 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo Hlm : 102

⁴ Suharto, Edi. 2007, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama

⁵ Sumodiningrat, Gunawan. 2009, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

pemerintah daerah meliputi: Disampaikan oleh pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan otonomi

Pemerintah Provinsi Pasuruan melaksanakan program udang baname sebagai bentuk konkrit untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan yang digunakan untuk melaksanakan Program Udang Baname adalah bahwa produksi budidaya udang terus meningkat selama lima tahun terakhir dan umumnya produksi udang terus meningkat.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim) melalui Dinas Perikanan Kabupaten Paslu-Ang menunjukkan adanya alokasi anggaran program agro agro hulu dan hilir sebesar Rp 8 miliar untuk Kabupaten Paslu-Ang. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai para petani pengguna teknologi Busmetik. Kebijakan tersebut selama ini dinilai masih sulit bagi petani untuk memperoleh pinjaman modal dari perbankan. Pasalnya, petani tergolong pekerjaan berisiko tinggi. Program aglomerasi ini memungkinkan para petani untuk mengajukan bantuan permodalan usaha melalui promosi bank Jatim.

Anggaran Rp 8 miliar digunakan untuk pinjaman, “suplai” antara Rp 250 juta sampai Rp 400 juta, dan bunganya rendah 6%. Kondisi saat ini, dengan luas tambak kurang lebih 15 hektar, telah dimanfaatkan teknik kecantikan Kabupaten Pasle Un untuk menambah jumlah petambak udang lumbung. Dari Rp4,8 miliar yang diusulkan, 13 petani menggunakan pinjaman, dan ada kebutuhan rata-rata untuk penambahan modal. Rata-rata peningkatan

pendapatan udang selama lima tahun terakhir mencapai 13,83% per tahun. Dari segi komersial, produksi udang terus meningkat yang berarti bahkan pada tahun 2014 ini udang vannamei masih terus meningkatkan produksinya. Sementara itu, produksi udang pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan pendapatan yang masih diperoleh masyarakat pesisir, dengan output yang masih di bawah tahun sebelumnya.⁶

Kehadiran udang vannamei di kalangan petambak semakin populer dengan berkurangnya produksi udang akibat kondisi lingkungan yang buruk, karena udang windu sangat rentan terhadap penyakit bintik putih. Kelemahan udang windu membutuhkan perawatan dan kerja keras perawatan. Setelah mengalami banyak masalah bagi petambak udang, pemerintah dan petambak kini mencari terobosan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya kami adalah memelihara spesies baru lobster selatan. Udang vaname merupakan pengganti udang windu (Rubiyanto dan Dian, 2005). Budidaya pisang udang dapat memberikan manfaat yang besar, terutama bagi masyarakat pesisir. Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir merupakan cara yang sadar, sistematis dan berkelanjutan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik desa nelayan dengan mengelola sumber daya yang potensial untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Diartikan sebagai upaya besar⁷.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jejaring dan keadilan. Pada

⁶ <https://kumparan.com/wartabromo/pemprop-jatim-gerojok-rp-8-m-untuk-petambak-udang-pasuruan-pengguna-teknologi-bumestik>, diakses tanggal 8 November 2019, pukul 21.00 WIB

⁷ Pranarka dan Vidhyandika. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Al Qaprint. Jatinangor

dasarnya pemberdayaan ditempatkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan menunjukkan sikap yang kuat dan spiritual. Dari konsep pemberdayaan, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut merupakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberdayakan atau memperkuat (menyempurnakan) suatu masyarakat. Pemberdayaan komunitas juga diartikan sebagai kemampuan individu dengan komunitas untuk membangun pemberdayaan komunitas yang terlibat dengan tujuan menemukan pilihan baru dalam pengembangan komunitas.⁸ Proses pemberdayaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan terkait pelaksanaan pemberdayaan. Dukungan pemberdayaan diberikan oleh kapasitas sumber daya manusia dan dukungan komponen modal. Pemberdayaan Sumber Daya sangat penting, penting dan strategis karena sumber daya manusia harus mampu mengubah sumber daya menjadi sumber daya lain dalam upaya mendukung proses pemberdayaan.

Intinya, model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui program kerja Udang Bangna di Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lecoq, Pasuruan yaitu dukungan sumber daya finansial melalui Program Bantuan Modal Usaha dan pengelolaan usaha melalui Program Pelatihan Masyarakat. Itu tergantung pada kemampuan untuk mendukung. Selain itu, kegiatan

⁸ Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama

penunjang usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan program yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Keuntungan ini bisa Anda peroleh secara maksimal jika udang yang dibudidayakan dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang maksimal dan normal. Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul penelitian ini yaitu: **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Tentang Implementasi Program Kerja Udang Vaname di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan untuk mencapai suatu perumusan masalah, maka akan terjadi tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui implementasi ilmu pemerintahan.
- b. Selain itu diharapkan juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan di lakukan oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi instansi pada umumnya dan khususnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pebisnis untuk meningkatkan implementasi program udang vaname.

1.5 Definisi Konsep

Definisi konseptual menggambarkan beberapa istilah atau konsep yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep yang dibuat dalam studi ini juga dibatasi, dan secara konseptual:

a. Implementasi Program Kerja

Dalam pelaksanaan program kerja ini terdapat tiga komponen pelaksana program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Mr Cotain mengatakan program akan berhasil jika implementasi program memiliki tiga elemen yang berdampingan. Pertama, kesesuaian program dan penerima manfaat, yaitu apa yang ditawarkan program dan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (penerima manfaat). Kedua, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana, yaitu persyaratan yang ditentukan oleh organisasi untuk memungkinkan kelompok sasaran program melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk mendapatkan keluaran program.⁹. Pola yang dikembangkan menunjukkan bahwa kinerja program tidak akan meningkat seperti yang diharapkan jika ketiga unsur pelaksanaan kebijakan tersebut tidak sesuai. Hal ini karena jika keluaran program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas keluaran tersebut tidak tersedia. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh program, maka organisasi tidak akan mampu menyediakan output program dengan baik. Atau, jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program, kelompok sasaran tidak akan mendapatkan

⁹ Akib, Haedar., dan Tarigan, Antonius., 2008, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik, hal.12

keluaran program. Oleh karena itu, kesesuaian antara ketiga elemen implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses pribadi dan sosial. Pembebasan kemampuan individu, kemampuan, kreativitas, kebebasan bertindak. Pemberdayaan juga terutama dimaksudkan untuk membantu klien membuat keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, dan mendapatkan kekuatan, kekuatan, dan kemampuan yang terkait dengannya.¹⁰. Orang yang mencapai tujuan kolektif diberdayakan oleh kemandirian. Ini juga "wajib" bahwa Anda dapat lebih diberdayakan oleh upaya dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan Anda tanpa menggunakan bantuan hubungan eksternal.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan serta memperkuat posisi lapisan sosial dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang memperkuat kekuatan atau pemberdayaan kelompok rentan di masyarakat, termasuk individu yang sedang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang dicapai oleh perubahan masyarakat. Dengan kata lain, mereka berdaya, berdaya, dan memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Mencari nafkah,

¹⁰ Payne. 2007. *Social Work and Community Care*, MacMillan. London

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan bekerja mandiri dalam kegiatan sehari-hari¹¹. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini dapat dimaknai sebagai upaya memulihkan atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan martabatnya dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengembangkan potensi ekonominya dan meningkatkan produktivitasnya sehingga memungkinkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitarnya dapat meningkatkan produktivitasnya. Ini adalah inisiatif yang merupakan mobilisasi.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan menggunakan konsep model implementasi George C. Edward III, dalam hal ini yaitu meliputi:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

¹¹ Sipahelut, Michel, Thesis, 2010, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor

- 1.6.2 Faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam hal ini yaitu meliputi:
- a. Faktor pendukung internal dan eksternal
 - b. Faktor penghambat internal dan eksternal

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian dalam mengevaluasi masalah, melainkan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengolah data dan menganalisis masalah secara non numerik. Menggunakan. Berdasarkan sekumpulan teori penelitian kualitatif. Karena jenis penelitian ini menitikberatkan pada uraian informatif dan data berupa kalimat-kalimat dengan makna mendalam yang dihasilkan dari tingkah laku yang diamati. Data hasil penelitian merupakan suatu fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan¹² Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.8 Jenis Penelitian

Karena tujuan penelitian ini adalah fenomena atau realitas sosial, maka jenis penelitian yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah deskriptif guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

¹² Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet., hal.38

Penelitian deskriptif atau taksonomi atau eksplorasi melibatkan penggalian fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempertanyakan hubungan antara variabel yang ada. Dan untuk tujuan penjelasan. Oleh karena itu, studi deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbedaan teoritis¹³. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan tentang objek penelitian seluas mungkin pada waktu tertentu¹⁴.

1.9 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sesuai dilapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari hasil olahan instansi atau suatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

¹³ Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers, Jakarta *International Labour Organization (ILO)*.2006. *Hak-Hak Pekerja Migran; Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia*. Publikasi ILO Jakarta, hlm.20

¹⁴ Ndraha, Taliziduhu, 2015, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Kampung*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm.105

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat sesuai dengan fakta dilapangan, guna untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai responden yang dianggap sebagai pemain kunci dalam survei ini. Penulis menggunakan pedoman wawancara untuk tetap berada dalam fokus yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat deskriptif.

b. Dokumentasi

Review dokumen yaitu review dokumen yang berupa buku acuan atau aturan, dan review artikel yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis, review dokumen dilakukan dengan cara menganalisis masalah. Dengan kata lain berkaitan dengan teori kebijakan pemerintah daerah, undang-undang, dan dokumen tentang pemberdayaan masyarakat..

c. Observasi

Suatu metode mengamati secara langsung suatu sasaran penelitian dan memperoleh data untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian tersebut. Dengan melakukan observasi, peneliti

merekam gambaran lengkap dari objek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena terkait peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah tentang pemberdayaan masyarakat.

1.11 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sarana penting untuk memperoleh banyak informasi. Informan adalah orang dalam dari latar belakang penelitian, dan informan harus memiliki banyak pengalaman dengan latar belakang penelitian dan menjadi anggota tim peneliti, walaupun bersifat informal. Peneliti menggunakan purposional sampling. Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini merupakan sumber informasi yang baik dalam menjawab pertanyaan yang ada. Objective sampling adalah teknik penentuan sampel survei dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif. Kriteria pemilihan sampel survei merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja udang vannamei dan pemberdayaan mereka yang bekerja langsung di program tersebut.

1.12 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

1.13 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif sebagai proses penerapan berbagai tingkat analisis, dari analisis khusus hingga analisis umum, pada langkah analisis data berikutnya¹⁵:

- a. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Yaitu dengan melakukan proses penyusunan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian.

- b. Membaca keseluruhan data

Pada tahap ini akan dilakukan analisis yang relevan dari hasil wawancara yang dilakukan untuk memahami makna dari hasil wawancara yang dilakukan.

- c. Menganalisis lebih detail dengan melakukan *coding* data

Proses pengkodean dilakukan untuk memudahkan proses analisis dari hasil wawancara yang dilakukan. Ini akan memungkinkan Anda untuk melihatnya dengan jelas dari informasi yang diberikan kepada penyedia penelitian.

- d. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, dimana pada tahap ini akan dilakukan analisis sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis yang telah dilakukan.

- e. Selanjutnya melakukan deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

¹⁵ Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 276

- f. Langkah terakhir yaitu dengan melakukan interpretasi dari hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan makna dari masing-masing hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan perbandingan dengan teori-teori yang digunakan¹⁶.



¹⁶ Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar